



Research Article

Mengatasi Dan Meningkatkan Pembangunan Hukum Dalam Ekonomi Melalui Studi Kasus Kenaikan Biaya Ibadah Haji Di Indonesia

Yenrizka Gusmaria¹, Tri Setiady²

1. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: ygusmaria@gmail.com 
2. Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
E-mail: trisetiady@fh.unsika.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 25, 2025
Accepted : March 12, 2025

Revised : February 27, 2025
Available online : April 26, 2025

How to Cite: Yenrizka Gusmaria and Tri Setiady (2025) "Addressing and Improving Legal Development in the Economy Through a Case Study of the Increase in Hajj Pilgrimage Costs in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 711-717. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1379.

Addressing and Improving Legal Development in the Economy Through a Case Study of the Increase in Hajj Pilgrimage Costs in Indonesia

Abstract. The Hajj pilgrimage is an important religious journey and must be carried out by all Muslims in the world and Indonesia has the largest Muslim population in the world. This research aims to analyze the development of the number of Hajj pilgrims in Indonesia in recent years and analyze the significant increase in Hajj costs after the Hajj pilgrimage was closed during the Covid-19 pandemic. In this research, the author uses statistical data to determine the development of Hajj pilgrims, the

factors increasing the cost of the Hajj pilgrimage and the social and economic impact. The results of this research show that despite the increase in the cost of the Hajj pilgrimage, pilgrims still continue to increase compared to the previous year. One of the factors for the increase in Hajj pilgrims is due to the closure of access to the Hajj pilgrimage in 2020 to 2021, this is due to the Covid-19 pandemic. The impact of the pandemic has affected all countries' economies, one of the countries affected is Indonesia, because this significant change in the Indonesian economy has resulted in an increase in the cost of the Hajj. With the proposed increase in the cost of the Hajj pilgrimage every year, it is a form of understanding regarding legal and economic development in Indonesia. It can be said that if the law is unable to play an effective role, it will certainly have a negative impact on economic development.

Keywords: Development of the number of Hajj pilgrims, Increase in the cost of the Hajj pilgrimage.

Abstrak. Ibadah haji merupakan suatu perjalanan religi yang penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia dan Indonesia memiliki mayoritas populasi umat muslim terbesar di dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan jumlah jamaah haji di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir serta menganalisis kenaikan biaya haji yang signifikan setelah ibadah haji sempat ditutup selama masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data statistik untuk mengetahui perkembangan jamaah haji, faktor-faktor kenaikan biaya ibadah haji serta dampak bagi sosial dan ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun adanya kenaikan biaya ibadah haji namun jamaah haji masih terus meningkat dari pada tahun sebelumnya, salah satu faktor meningkatnya jamaah haji dikarenakan ditutupnya akses ibadah haji pada tahun 2020 hingga 2021, hal ini di karenakan adanya pandemi Covid-19. Dampak pandemi mempengaruhi seluruh ekonomi negara salah satu negara yang terdampak adalah Indonesia, karena perubahan signifikan terhadap perekonomian Indonesia ini berimbas pada kenaikan biaya haji. Dengan adanya usulan kenaikan biaya ibadah haji setiap tahunnya menjadi salah satu bentuk pemahaman mengenai pembangunan hukum dan ekonomi di Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila hukum tidak mampu berperan secara efektif maka akan dipastikan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi.

Kata Kunci : Perkembangan jumlah jamaah haji, Kenaikan biaya ibadah haji.

PENDAHULUAN

Ibadah haji merupakan suatu perjalanan religi yang penting dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia dan Indonesia memiliki mayoritas populasi umat muslim terbesar di dunia.

Kenaikan biaya ibadah haji juga sangat berpengaruh bagi para jamaah, selain itu kenaikan biaya ini juga berpengaruh bagi ekonomi dan sosial. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan fasilitas perjalanan haji yang terbaik bagi warga negara nya setiap tahun, adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menaikkan biaya ibadah haji baik dari aspek sosial dan ekonomi serta dari aspek pariwisata, perhotelan dan infrastruktur terkait lainnya.

Di tengah kenaikan biaya haji yang signifikan ini jumlah jamaah haji semakin meningkat, hal ini bukan hanya menandakan bahwa besarnya kesadaran agama dalam diri masyarakat, hal ini juga menandakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji.

Menurut Duta Besar RI di Arab Saudi kuota haji Indonesia pada 2023 merupakan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Total kuota jemaah haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi sebesar 229.000, yang semula hanya 221.000. Dari kuota 229.000 tersebut terdiri dari 203.320 kuota jemaah haji reguler dan 17.680 kuota jemaah haji khusus, Indonesia juga mendapatkan kuota jemaah haji tambahan sebanyak 8.000 orang.¹

Kenaikan jumlah jemaah haji dan kenaikan biaya haji ini juga memberikan dampak pada sektor-sektor ekonomi tertentu seperti pariwisata dan perhotelan, hal ini juga sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kenaikan haji bukan hanya menjadi penyempurna ibadah seseorang, tetapi memiliki kontribusi bagi perkembangan ekonomi di Indonesia.

Dalam tulisan ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai kenaikan jumlah jemaah haji, serta kenaikan biaya haji yang memberi peranan dalam pembangunan ekonomi. Aspek ini memegang peranan kunci dalam memastikan bahwa pembangunan hukum akan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi ekonomi secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat muslim untuk menyempurnakan ketaqwaannya kepada Allah SWT, selain itu ibadah haji juga perintah agama yang wajib dilaksanakan bagi umat muslim bila mampu. Ibadah haji merupakan impian bagi semua umat muslim, banyak orang yang mengorbankan harta duniawinya untuk bisa mendaftarkan diri pergi haji, dari mulai mendaftarkan diri hingga berangkat ke tanah suci pun umat muslim harus bersabar karena memerlukan waktu yang cukup lama, keberangkatan haji pun mengikuti daftar antrian, untuk pendaftaran reguler bisa menunggu waktu keberangkatan hingga 30 tahun lamanya.

Saat ini rakyat pun dihebohkan oleh berita kenaikan biaya haji yang terus meningkat setiap tahunnya, apalagi setelah ibadah haji ditutup sementara pada masa pandemi selama dua tahun, pada tahun 2022 ibadah haji baru di buka kembali dan setelah itu kenaikan biaya haji melonjak sangat signifikan. Yang semula pada tahun 2019 biaya haji hanya 35,24 juta, selanjutnya saat ibadah haji dibuka kembali pada tahun 2022 biayanya mencapai 39,89 juta, dan pada 2024 ini biaya yang dibayar per

¹ Annur, Cindy, Mutia. (2023). *Jumlah Jemaah Haji Indonesia 2023 Capai 229 Ribu Orang, Ini Trennya Jelang Dua Dekade Terakhir*. Diakses pada 21 April 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/25/jumlah-jemaah-haji-indonesia-2023-capai-229-ribu-orang-ini-trennya-jelang-dua-dekade-terakhir#:~:text=No.&text=Indonesia%20memiliki%20total%20kuota%20jemaah,jemaah%20haji%20sebanyak%208.000%20orang>.

jamaah adalah 56,04 juta.² Dilihat dari data tersebut biaya haji tersebut dari sebelum terjadinya covid hingga saat ini sudah mengalami kenaikan hingga setengahnya.

Sebab melonjaknya biaya haji ini dikarenakan biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) mengalami kenaikan, selain itu yang menjadi alasan kenaikan biaya haji tersebut karena naiknya harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, inflasi dan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang telah menetapkan biaya layanan di masyair yang mengalami kenaikan pada tahun 2022, hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief.

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji. Sedangkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan jumlah dana yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji.³ Nilai manfaat adalah nilai imbal hasil dari hasil pengelolaan atau optimalisasi keuangan haji yang dilakukan oleh BPKH.⁴

Komisi VIII DPR RI menetapkan besaran rata-rata BPIH Tahun 1445 H/2024 untuk jamaah haji reguler sebesar Rp.93.410.286,07 yang telah disepakati oleh Kementerian Agama RI. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terus mengalami kenaikan, tetapi presentasi besaran nilai manfaat dan Bipih pada BPIH tak selalu sama. Berikut data biaya naik haji dari tahun 2019 hingga tahun 2024 :

a. Biaya haji 2019

- Biaya yang dibayar per jamaah : Rp.35,24 juta
- Nilai manfaat : Rp.33,92 juta
- Total BPIH : Rp.69,16 juta

b. Biaya haji 2022

- Biaya yang dibayar per jamaah : Rp.39,89 juta
- Nilai manfaat : Rp.57,91 juta
- Total BPIH : Rp.97,79 juta

c. Biaya haji 2023

- Biaya yang dibayar per jamaah : Rp.49,9 juta
- Nilai manfaat : Rp.40,2 juta
- Total BPIH : Rp.90 juta

d. Biaya haji 2024

- Biaya yang dibayar per jamaah : Rp.56,04 juta
- Nilai manfaat : Rp.37,36 juta
- Total BPIH : Rp.93,41 juta

² Nurhanisah, Yuli. (2024). *Biaya Haji Indonesia Tahun ke Tahun*. Diakses pada 21 April 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/biaya-haji-indonesia-tahun-ke-tahun#:~:text=Biaya%20haji%20tahun%202024%20mengalami,yang%20sebesar%2049%2C8%20juta.>

³ Kemenag. (2023). *Ada BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat, Berapa yang dibayar jemaah haji?*. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ada-bpih-bipih-dan-nilai-manfaat-berapa-yang-dibayar-jemaah-haji-#:~:text=BPIH%2C%20omisalnya%2C%20adalah%20singkatan%20dari,untuk%20operasional%20Penyelenggaraan%20Ibadah%20Haji>

⁴ BPKH. *Apa sih nilai manfaat itu dan apa keuntungannya*. Diakses pada 24 April 2024, dari [https://bpkh.go.id/faq/apa-sih-nilai-manfaat-itu-dan-apa-keuntungannya/.](https://bpkh.go.id/faq/apa-sih-nilai-manfaat-itu-dan-apa-keuntungannya/)

Dengan adanya kenaikan secara terus menerus banyak jemaah haji yang melakukan penarikan dana setoran awal, hal tersebut akan berdampak buruk untuk pelaksanaan haji ke depannya karena akan merubah pola pengelolaan dana haji. Dalam dunia investasi Skema Ponzi sebagai modus investasi bodong yang memberikan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Model investasi seperti ini tidak bisa bertahan lama jika tidak ada investor baru yang masuk.⁵ Jika biaya haji dikaitkan dengan teori investasi ini maka akan menimbulkan kerugian bagi jamaah yang telah menyetorkan biaya haji sebelum keberangkatannya, maka dengan kata lain berdasarkan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi, hukum yang berjalan tidak dapat membantu stabilitas pasar.

Rakyat dibuat curiga dengan pengelolaan haji saat ini karena terjadinya kenaikan yang tinggi, meskipun kementerian agama telah mengumumkan secara resmi biaya haji namun jamaah harus membayar biaya tambahan dengan batas pelunasan dalam waktu yang singkat, hal ini memberatkan bagi jamaah haji.

Direktorat Monitoring KPK menyampaikan bahwa yang menjadi rawan korupsi dalam dana penyelenggaraan haji ini yaitu biaya akomodasi, biaya konsumsi dan biaya pengawasan. Oleh karena itu hal ini perlu di audit khusus kepada BPKH dalam pengelolaan dana haji.⁶

Pengelolaan dana haji tidak lepas juga dari dunia bisnis karena dalam sistem kapitalis untung dan rugi menjadi fokus untuk berpikir cara menghasilkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Ibadah haji yang seharusnya sakral namun dijadikan ladang bisnis yang menghasilkan keuntungan yang besar dari dana yang disetorkan oleh jamaah kepada negara yaitu Kementerian Agama melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) mencatat dana kelola haji saat ini sebesar 166,01 triliun.⁷ Berdasarkan laporan keuangan BPKH dana haji ini ditempatkan dalam kegiatan bisnis investasi perbankan dan berbagai instrumen investasi lainnya. Investasi dana haji ditempatkan ke perbankan sebesar Rp. 48,96 triliun (29,50%) dari total keseluruhan dan selebihnya dana haji di investasikan ke instrumen investasi lainnya yaitu sebesar Rp.117,05 triliun. Selanjutnya dana yang di investasikan dalam instrumen lainnya terbagi ke surat berharga negara (SBN) sebesar Rp.114,96 triliun dan pada investasi entitas asosiasi sebesar Rp.1,30 triliun. Kemudian ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp.779,06 milyar dan pada investasi emas sebesar Rp.425 juta.

Jika dihubungkan dengan dunia bisnis dan investasi pasti akan ada dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Jika hasil dari investasi dana pengelolaan

⁵ Otoritas Jasa Keuangan. *Hati hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi*. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>

⁶ Iwandi. (2023). *Analisis Kenaikan Ongkos Haji Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syariah : Studi kasus mengenai perkembangan jumlah jamaah haji Indonesia*. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://e-journal.stasiak.ac.id/index.php/al-hasyimiyah/article/view/84/53>

⁷ BPKH. (2023). *Laporan Keuangan Konsolidasian Semester I 2023 (Unaudited)*. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://bpkh.go.id/download/laporan-keuangan-konsolidasian-semester-i-2023-unaudited/>

keuangan haji ini berdampak positif dan menghasilkan keuntungan maka kemanakah arah regulasi keuntungan ini akan ditempatkan. Sedangkan jika dari investasi ini berdampak negatif dan menghasilkan kerugian maka apakah ada pertanggung jawaban dari pemerintah melalui kementerian agama dalam hal ini badan pengelola keuangan haji (BPKH) atau kerugian ini akan ditanggung oleh jamaah haji di tahun yang akan datang dengan adanya kenaikan biaya haji.

Investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan dana haji dinilai tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menerapkan konsep pengembangan harta harus bersifat jelas tanpa ada sesuatu yang abu-abu karena harus sesuai dengan akad yang jelas sebagai pemilik harta dan sebagai pengelola harta. Dalam Islam akad kerja sama antara dua belah pihak harus memberikan kontribusi dan modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan secara proposional dan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proposional.

Beberapa hal peranan hukum dalam pembangunan ekonomi

a. Melindungi hak kepemilikan

Hukum memberikan perlindungan terhadap uang jamaah haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan adanya perlindungan ini maka investasi yang dihasilkan menjadi sehat karena investor merasa haknya diakui dan dilindungi.

b. Mengatur hubungan bisnis

Hukum mengatur hubungan bisnis antara jamaah haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dimaksudkan bahwa perjanjian awal harus jelas dan terbuka mengenai keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari investasi tersebut untuk mencegah konflik dan meningkatkan kepercayaan antar para pihak.

c. Menjaga stabilitas pasar

Hukum dapat membantu menjaga stabilitas pasar dengan mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Regulasi yang baik dan penegakan hukum yang adil dapat mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang dapat merusak stabilitas pasar.

d. Meningkatkan kualitas hidup

Hukum membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengatur kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perkembangan jumlah jamaah haji di Indonesia beberapa tahun belakangan yang mengalami peningkatan dan dampak kenaikan biaya ibadah haji yang berpengaruh bagi aspek sosial dan ekonomi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pada tahun 2023 jumlah kuota haji naik sekitar 128,88% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat hanya sebanyak 100.051 orang, keberangkatan jamaah haji ini melonjak sangat signifikan, hal ini disebabkan selain meningkatnya kesadaran agama seseorang, ini juga dikarenakan faktor ekonomi.

Kenaikan jumlah jamaah haji berdampak bagi sektor ekonomi terutama pada sektor pariwisata dan perhotelan. Sedangkan melonjaknya biaya haji disebabkan oleh naiknya harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak dan inflasi.

SARAN

Upaya menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan ibadah haji bisa dilakukan dengan cara menerapkannya sistem Islam dalam kehidupan bernegara. Jika suatu negara menerapkan sistem kehidupan kapitalis maka penyelenggaraan ibadah haji ini akan terus menimbulkan masalah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa apabila hukum tidak mampu berperan secara efektif maka akan dipastikan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSAKA

- Annur, Cindy, Mutia. (2023). Jumlah Jemaah Haji Indonesia 2023 Capai 229 Ribu Orang, Ini Trennya Jelang Dua Dekade Terakhir. Diakses pada 21 April 2024, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/25/jumlah-jemaah-haji-indonesia-2023-capai-229-ribu-orang-ini-trennya-jelang-dua-dekade-terakhir#:~:text=No.&text=Indonesia%20memiliki%20total%20kuota%20jemaah,jemaah%20haji%20sebanyak%208.000%20orang>.
- BPKH. Apa sih nilai manfaat itu dan apa keuntungannya. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://bpkh.go.id/faq/apa-sih-nilai-manfaat-itu-dan-apa-keuntungannya/>.
- BPKH. (2023). Laporan Keuangan Konsolidasian Semester I 2023 (Unaudited). Diakses pada 24 April 2024, dari <https://bpkh.go.id/download/laporan-keuangan-konsolidasian-semester-i-2023-unaudited/>
- Iwandi. (2023). Analisis Kenaikan Ongkos Haji Indonesia dalam perspektif Ekonomi Syariah : Studi kasus mengenai perkembangan jumlah jemaah haji Indonesia. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://e-journal.staisiak.ac.id/index.php/al-hasyimiyah/article/view/84/53>
- Kemenag. (2023). Ada BPIH, Bipih, dan Nilai Manfaat, Berapa yang dibayar jemaah haji?. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/ada-bpih-bipih-dan-nilai-manfaat-berapa-yang-dibayar-jemaah-haji-#:~:text=BPIH%2C%20misalnya%2C%20adalah%20osingkatan%20dari,untuk%20operasional%20Penyelenggaraan%20Ibadah%20Haji>
- Nurhanisah, Yuli. (2024). Biaya Haji Indonesia Tahun ke Tahun. Diakses pada 21 April 2024, dari <https://indonesiabaik.id/infografis/biaya-haji-indonesia-tahun-ke-tahun#:~:text=Biaya%20haji%20tahun%202024%20mengalami,yang%20sebesar%2049%2C8%20juta>
- Otoritas Jasa Keuangan. Hati hati Investasi Bodong, Pahami Tentang Skema Ponzi. Diakses pada 24 April 2024, dari <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20633>